



KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN, TRANSPARANSI INFORMASI DAN KUALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN: INDEPENDENSI KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2024)

Evangelista Ivena Putri, Anis Chariri¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486841

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the influence of disclosure policy and information transparency on the quality of sustainability reports, as well as to analyze the role of audit committee independence as a factor moderating this relationship.

The population used in this research are all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), totaling approximately 48 companies as of 2024. The data collection method employed was purposive sampling, carried out based on specific criteria, namely banking companies consistently publishing sustainability reports. The research method utilized is multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with secondary data obtained from the annual reports and sustainability reports of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and supporting data from Bloomberg, covering the period of 2022–2024.

The results of the analysis indicate that both disclosure policy and information transparency have a significant positive effect on the quality of sustainability reports. Furthermore, the audit committee independence is proven to strengthen the relationship, between disclosure policy and sustainability report quality, whereas it weakens the relationship between information transparency and sustainability report quality.

Keywords: Disclosure policy, information transparency, quality of sustainability reports, audit committee independence.

PENDAHULUAN

Kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan mendorong banyak perusahaan dari berbagai bidang untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam kegiatan bisnis mereka. Salah satu langkah yang dianggap penting dalam penerapan ESG adalah menyusun laporan keberlanjutan, yang berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan performa mereka dalam aspek finansial, ekologi, serta kemasyarakatan yang ditujukan bagi seluruh pihak berkepentingan (*stakeholders*) (GRI, 2021; Hahn & Kühnen, 2013). Di sektor perbankan, *sustainability report* tidak semata-mata berperan sebagai alat akuntabilitas sosial, tetapi juga menjadi alat untuk mengelola risiko terkait lingkungan dan sosial dari kegiatan pembiayaan bank (Gabriel-Odom et al., 2024).

Kualitas laporan keberlanjutan kini telah menjadi salah satu indikator untuk menilai seberapa besar komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam standar dan cara-cara pelaporan keberlanjutan, yang dapat terlihat jelas baik antarperusahaan maupun antarnegara (Kılıç & Kuzey, 2019). Di Indonesia, implementasinya masih menghadapi kendala kompleksitas pengukuran dampak tidak langsung (*financed emissions*) dan kurangnya pedoman teknis yang seragam, sehingga menciptakan variasi kualitas pelaporan yang signifikan antar bank (OJK, 2021). Walaupun praktik pelaporan keberlanjutan terus mengalami perkembangan seiring waktu, banyak bank dengan modal inti yang lebih kecil (kategori KBMI 1 dan 2) yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menghasilkan laporan

¹ Corresponding author

keberlanjutan yang berkualitas. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang besar antara bank dengan modal inti besar (KBMI 4) dengan bank dengan modal inti lebih kecil.

Perbedaan kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia mengindikasikan bahwa standar pelaporan di Indonesia masih belum seragam, yang berpotensi menciptakan asimetri informasi di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian mengenai determinan yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan di sektor perbankan menjadi sangat penting. Penelitian ini berusaha membedakan kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi untuk mengetahui manakah yang lebih berpengaruh berkaitan dengan kualitas penyampaian informasi keberlanjutan pada industri perbankan nasional.

Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan ditentukan oleh berbagai faktor sejumlah aspek internal dan eksternal, termasuk praktik sistem pengelolaan korporasi yang optimal serta dorongan dari pihak berkepentingan, dan regulasi yang ditetapkan pemerintah (Michelon & Parbonetti, 2015). Perusahaan dengan struktur tata kelola yang lebih baik, termasuk keberagaman dewan, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite yang efektif, cenderung menghasilkan laporan yang lebih berkualitas (Correa-garcia et al., 2020; Dewi & Pitriasari, 2019; Guida et al., 2022).

Sektor perbankan memiliki karakteristik yang kompleks, salah satunya adalah kewajiban yang mengharuskan bank untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Risk/ESR*) dari pinjaman yang mereka salurkan (financed emissions), serta sangat peka terhadap risiko reputasi, sehingga kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan, tetapi juga bagian dari strategi manajemen risiko. Namun, penelitian yang menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kualitas laporan keberlanjutan di sektor ini masih terbatas.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi mendalam tentang bagaimana kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan di sektor perbankan Indonesia. Kebijakan pengungkapan dalam konteks perbankan merupakan suatu kebijakan yang mengatur sejauh mana bank memiliki pedoman formal dan terdokumentasi untuk menyampaikan data yang mencakup aspek finansial dan non-finansial, baik secara wajib maupun sukarela kepada masyarakat. Transparansi informasi berkaitan dengan tingkat keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi penting dan akurat mengenai aktivitas sosial serta dampak lingkungannya, sekaligus memperlihatkan komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG (Gómez-gonzález et al., 2025).

Penelitian ini juga menempatkan independensi komite audit sebagai faktor penguat yang mampu memoderasi keterkaitan antar kebijakan pengungkapan, transparansi informasi, dan kualitas laporan keberlanjutan pada sektor perbankan. Mekanisme moderasi independensi komite audit diduga bekerja secara berbeda dalam memperkuat kedua hubungan yang diuji. Peran independensi komite audit sebagai variabel moderasi dinilai penting karena temuan penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan sering kali tidak konsisten.

Studi ini berfokus pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2022–2024, dengan pertimbangan bahwa sektor ini memiliki regulasi yang ketat, khususnya melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang secara eksplisit mewajibkan bank untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada sektor perbankan Indonesia, serta menguji peran independensi komite audit sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Selain itu, studi ini diharapkan memperkaya kajian ilmiah mengenai *sustainability reporting* dan corporate governance perbankan, serta menjadi acuan praktis bagi perbankan Indonesia dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Teori Keagenan memfokuskan pada hubungan antara pihak yang memiliki wewenang (prinsipal) serta pihak yang memperoleh mandat untuk bertindak (agen). Hubungan ini muncul karena para pemilik modal seringkali tidak punya keahlian atau waktu yang cukup untuk mengelola

perusahaan sehari-hari, sehingga mereka menunjuk manajemen untuk menjalankan perusahaan atas nama mereka (Jensen & Meckling, 1976). Asumsi dasar meliputi *self-interest*, *bounded rationality*, dan *asymmetry of information*, yang menimbulkan konflik kepentingan dan biaya keagenan.

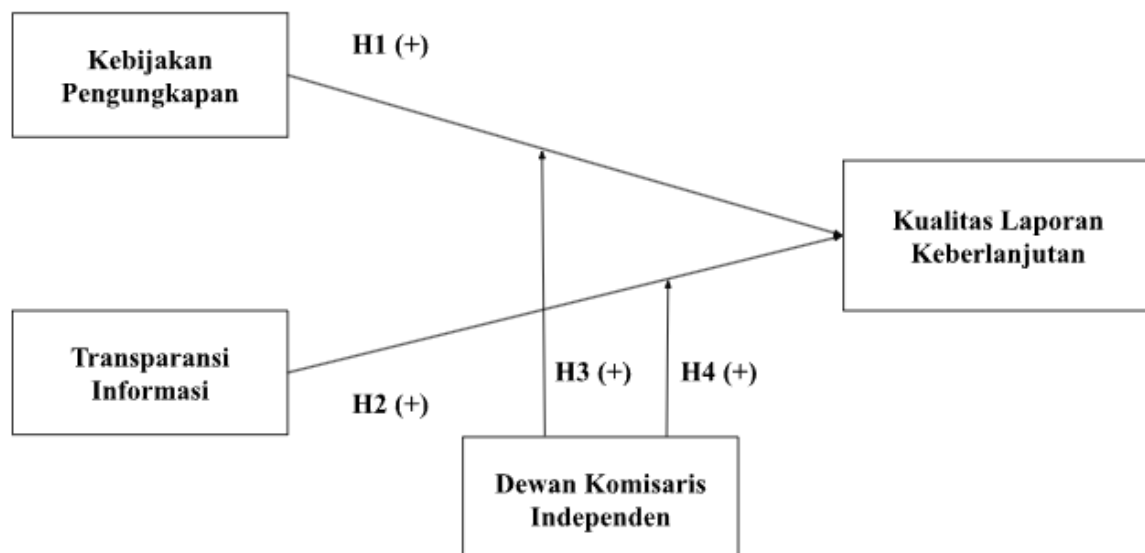
Dalam penelitian ini, teori keagenan sangat relevan karena menjelaskan bagaimana manajemen (sebagai agen) memiliki kebebasan dalam menetapkan jenis data yang akan dipilih dan disampaikan dalam proses pelaporan (kebijakan pengungkapan) dan bagaimana informasi tersebut akan disajikan (transparansi informasi), yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

Independensi komite audit berperan sebagai mekanisme moderasi dalam mengurangi kecenderungan manajemen untuk bertindak demi kepentingan sendiri dan menjamin bahwa pelaporan berkelanjutan memberikan data yang tepat, sesuai kebutuhan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan komite audit independen diharapkan membantu mengharmoniskan tujuan antara pemilik dan pengelola dalam konteks pengungkapan informasi keberlanjutan di sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kualitas laporan keberlanjutan, variabel independen kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi, serta variabel moderasi independensi komite audit.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Pengungkapan Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Secara konseptual, penerapan kebijakan pengungkapan yang terstruktur dan komprehensif diyakini akan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan perbankan di BEI. Kebijakan ini berfungsi untuk memberikan panduan yang jelas dalam menentukan jenis informasi keberlanjutan yang perlu diungkapkan, format penyajian, frekuensi pelaporan, serta standar yang digunakan, sesuai dengan regulasi OJK dan standar internasional seperti GRI. Dengan adanya panduan dan struktur kebijakan yang jelas, perusahaan perbankan cenderung akan menyajikan informasi yang lebih relevan, konsisten, dan dapat dengan jelas dimengerti oleh seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut.

Dalam perspektif teori keagenan, kebijakan pengungkapan membantu mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian terdahulu mendukung bahwa kebijakan pengungkapan formal secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan (Chang et al., 2019; Gerwing et al., 2022; Gómez-gonzález et al.,

2025; Hahn & Kühnen, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1: Kebijakan Pengungkapan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Dalam perspektif konseptual, tingkat transparansi informasi yang tinggi dalam pelaporan keberlanjutan diyakini akan meningkatkan kualitas laporan tersebut pada perusahaan perbankan di BEI. Ketika perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan dengan terbuka, jelas, mudah diakses, dan akurat, para pihak-pihak terkait seperti pelanggan, penanam modal, otoritas pengawas, serta publik luas mampu lebih memahami dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara komprehensif. Transparansi mengurangi ketidakpastian informasi dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan.

Pendekatan ini didukung oleh Teori Keagenan, yang menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan akses informasi antara pihak pengelola dan pemilik kepentingan utama (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian terdahulu membuktikan korelasi positif transparansi dengan kualitas pelaporan (Correa-garcia et al., 2020; Gómez-gonzález et al., 2025; Hahn & Kühnen, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

Peran Moderasi Independensi Komite Audit dalam Hubungan Kebijakan Pengungkapan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Kebijakan Pengungkapan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan Keberadaan komite audit yang independen diyakini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengungkapan dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan di BEI. Komite audit independen yang bebas dari pengaruh manajemen internal menjadikannya pihak yang objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan audit dan pelaporan, sesuai dengan peraturan OJK yang mewajibkan komite audit independen di bank. Pengawasan aktif dari komite audit independen dapat mendorong perusahaan perbankan untuk melaksanakan pengungkapan lebih dari sekadar memenuhi kewajiban minimum.

Berdasarkan teori keagenan, komite audit independen berfungsi sebagai pengendali konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976). Studi empiris mendukung peran moderasi independensi komite audit (Gerwing et al., 2022; Lusmeida & Amelia, 2023; Santonastaso et al., 2025). Didasarkan pada penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Independensi Komite Audit Memperkuat Pengaruh Positif Kebijakan Pengungkapan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

Peran Moderasi Independensi Komite Audit dalam Hubungan Transparansi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Pajak tangguhan dapat berdampak signifikan terhadap beban pajak secara keseluruhan, yang terdiri Kehadiran komite audit yang independen diperkirakan mampu meningkatkan fungsi transparansi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan di BEI. Komite audit yang otonom, sebagai entitas yang memegang peran kontrol audit dan pelaporan, berperan dalam memastikan akuntabilitas perusahaan. Keberadaan komite audit yang independen mampu memotivasi manajemen agar tidak sebatas menyampaikan informasi secara terbuka, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut akurat, relevan, dan disajikan melalui metode yang sederhana untuk dimengerti oleh seluruh pihak terkait.

Argumen ini didukung oleh Teori Keagenan, yang menyatakan bahwa komite audit independen memiliki tugas untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian terdahulu mengonfirmasi efek moderasi independensi komite audit yang memperkuat hubungan transparansi terhadap kualitas pelaporan

(Aprianti et al., 2022; Santonastaso et al., 2025). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H4: Independensi Komite Audit Memperkuat Pengaruh Positif Transparansi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Variabel Penelitian

Studi ini mencakup tiga jenis variabel yakni variabel independen, variabel dependen, serta variabel moderasi.

Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keberlanjutan

Kualitas laporan keberlanjutan didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian dengan prinsip-prinsip pelaporan praktik berkelanjutan yang optimal meliputi dimensi finansial, ekologis, serta kemasyarakatan (*triple bottom line*), sesuai dengan standar GRI (Elkington, 2001; GRI, 2021). Kualitas laporan keberlanjutan sebagai variabel dependen diukur menggunakan indeks pengungkapan (*disclosure index*) berdasarkan content analysis terhadap laporan keberlanjutan dengan mengacu pada kerangka GRI Standards 2021. Indeks ini mencakup 125 item pengungkapan yang meliputi GRI 2: Pengungkapan Umum, GRI 3: Topik Material, serta kategori ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400). Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan dengan jelas dan sesuai standar, serta skor 0 jika tidak diungkapkan. Nilai akhir dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks Kualitas} = \frac{\sum \text{item yang diungkapkan}}{125}$$

Variabel Independen 1: Kebijakan Pengungkapan

Kebijakan pengungkapan merujuk pada perdoman formal perusahaan terkait pengaturan jenis, tingkat, frekuensi, dan format pengungkapan informasi keberlanjutan (Gray et al., 1995). Kebijakan pengungkapan diukur menggunakan indikator dummy dengan nilai 1 apabila perusahaan memenuhi ketiga elemen secara bersamaan: (1) pernyataan komitmen perusahaan yang spesifik terhadap pengungkapan keberlanjutan, (2) penggunaan standar pelaporan yang diakui seperti GRI, SASB, TCFD, atau POJK, serta (3) tersedianya laporan keberlanjutan terpisah atau bagian khusus keberlanjutan dalam laporan tahunan; dan nilai 0 apabila salah satu atau lebih elemen tidak terpenuhi.

Variabel Independen 2: Transparansi Informasi

Transparansi informasi berfokus pada aksesibilitas, kedetailan, dan dapat diverifikasinya informasi ESG oleh pihak independen. Transparansi informasi diukur menggunakan ESG Disclosure Score dari Bloomberg Terminal dengan rentang 0–100. Skor ini mencakup indikator yang lebih luas, tidak hanya apa yang diungkapkan, tetapi juga kedetailan data ESG yang dilaporkan, adanya verifikasi oleh pihak ketiga independen, dan ketersediaan informasi di situs perusahaan.

Variabel Moderasi: Independensi Komite Audit

Independensi komite pengawas internal mencerminkan sejauh mana mereka bersikap netral dalam melaksanakan tugas pengendalian pelaporan keuangan dan non-keuangan, tanpa tekanan dari manajemen internal. Independensi komite audit (variabel moderasi) diukur dengan persentase anggota independen dibandingkan keseluruhan anggota komite audit. Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit wajib terdiri atas sedikitnya tiga anggota yang mencakup komisaris non-afiliasi dan pihak eksternal yang bebas dari keterkaitan apapun dengan perusahaan.

Populasi dan Sampel

Cakupan objek penelitian meliputi seluruh entitas perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022–2024. Karakteristik utama dari populasi ini adalah status mereka

sebagai perusahaan perbankan publik yang bertanggung jawab untuk mengumumkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan secara periodik, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh OJK serta standar BEI. Jumlah populasi penelitian adalah 48 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode tersebut. Proses penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Bank yang tercatat secara berkelanjutan di BEI sepanjang periode penelitian 2022–2024.
2. Perusahaan perbankan yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan serta laporan keberlanjutan selama masa penelitian.
3. Perusahaan memiliki ketersediaan data yang memadai pada Bloomberg Terminal untuk mengukur semua variabel penelitian.
4. Perusahaan perbankan tidak dalam status suspensi perdagangan saham atau proses delisting dari BEI.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 25 perusahaan perbankan sebagai sampel akhir penelitian dengan periode pengamatan selama 3 tahun (2022–2024), sehingga total data pengamatan menjadi 75 laporan. Sampel ini mencerminkan bank yang konsisten melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beserta beberapa bank lainnya yang memenuhi kriteria penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Asumsi klasik diuji melalui uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (Tolerance dan VIF), uji autokorelasi (Durbin-Watson), dan uji heteroskedastisitas (scatterplot). Pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan SPSS versi 27. Model regresi linear berganda dan model MRA yang digunakan adalah:

Persamaan 1 (Regresi Linear Berganda)

$$KLK = \beta_0 + \beta_1 KP + \beta_2 TI + e$$

Persamaan 2 (*Moderated Regression Analysis*)

$$KLK = \beta_0 + \beta_1 KP + \beta_2 TI + \beta_3 IKA + \beta_4 (KP \times IKA) + \beta_5 (TI \times IKA) + e$$

Keterangan:

- KLK : Kualitas Laporan Keberlanjutan
KP : Kebijakan Pengungkapan
TI : Transparansi Informasi
IKA : Independensi Komite Audit
 β_0 : Nilai Konstanta
 β_1 – β_5 : Koefisien regresi masing-masing variabel
e : Koefisien error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses pemilihan sampel serta temuan penelitian yang mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian model melalui regresi linear berganda serta regresi moderasi.

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan Bloomberg. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penentuan sampel sehingga diperoleh 25 perusahaan dengan total 75 observasi dengan langkah-langkah pemilihan sampel berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 1
Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2022-2024.	48
2.	Perusahaan perbankan secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dapat diakses secara publik selama periode penelitian.	(2)
3.	Perusahaan perbankan memiliki ketersediaan data laporan keuangan yang lengkap untuk mengukur semua variabel penelitian	(17)
4.	Perusahaan perbankan tidak dalam status suspensi perdagangan saham maupun proses <i>delisting</i> dari BEI selama periode penelitian.	(4)
Jumlah sampel akhir penelitian		25

Sumber: Data diolah, 2026

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan ilustrasi menyeluruh terhadap data dari masing-masing variabel penelitian. Pada tabel 2, variabel kebijakan pengungkapan menunjukkan bahwa dari 75 perusahaan sampel, sebanyak 61 perusahaan (81,33%) telah memenuhi seluruh elemen kebijakan pengungkapan keberlanjutan, sementara 14 perusahaan sisanya (18,67%) belum memenuhi satu atau lebih elemen ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan perbankan telah memiliki kebijakan pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif.

Tabel 2
Tabel Distribusi Frekuensi

	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid .00	14	18.7%	18.7%
1.00	61	81.3%	100.0%
Total	75	100.0%	

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, variabel transparansi informasi, diperoleh nilai rata-rata sebesar 50,2420 dengan rentang nilai antara 34,53 hingga 66,48, yang mengindikasikan adanya variasi tingkat transparansi antarperusahaan. Nilai standar deviasi sebesar 8,67612 menunjukkan tingkat penyebaran data yang cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik transparansi informasi masih belum merata.

Selanjutnya, variabel kualitas laporan keberlanjutan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7549 yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas laporan tergolong baik. Rentang nilai antara 0,56 hingga 0,91 serta standar deviasi yang relatif kecil (0,09003) mengindikasikan bahwa perbedaan kualitas laporan antarperusahaan tidak terlalu signifikan.

Adapun variabel independensi komite audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,9268 dengan rentang 0,67 hingga 1,00. Nilai ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat independensi komite audit tergolong tinggi. Standar deviasi sebesar 0,12769 menunjukkan bahwa variasi antarperusahaan relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki struktur komite audit yang independen.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi Informasi	75	34.53	66.48	50.2420	8.67612
Kualitas Laporan Keberlanjutan	75	.56	.91	.7549	.09003
Independensi Komite Audit	75	.67	1.00	.9268	.12769
Valid N (<i>listwise</i>)	75				

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 27.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual yang mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov (K-S), dengan kriteria bahwa data dianggap normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05. Tabel 4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05010367
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.046
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model analisis regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat indikator Tolerance serta VIF, dengan ketentuan tidak terjadi multikolinearitas apabila Tolerance melebihi 0,10 dan VIF berada di bawah 10. Berdasarkan hasil pada tabel 5 menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,839; 0,865; dan 0,892 serta nilai VIF sebesar 1,192; 1,156; dan 1,122, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kebijakan Pengungkapan	.839	1.192
Transparansi Informasi	.865	1.156
Independensi Komite Audit	.892	1.122

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara nilai residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi dengan menggunakan Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,940, dengan nilai

batas bawah (dL) sebesar 1,5709 dan batas atas (dU) sebesar 1,6802. Nilai d yang lebih besar dari dU ($1,940 > 1,6802$) menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

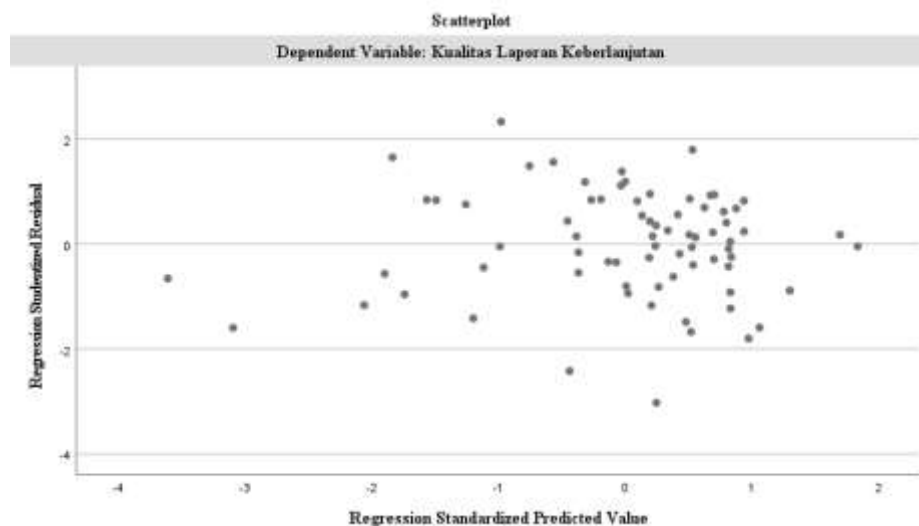
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.594	.577	.05117	1.940

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas, artinya varians nilai sisa antar observasi menunjukkan kestabilan yang relatif seragam (homoskedastisitas). Hasil menunjukkan titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak di sekitar angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi pada kualitas laporan keberlanjutan perusahaan perbankan. Pengolahan data menggunakan SPSS 27 menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KLK = 0,152 + 0,066KP + 0,006TI + e$$

Tabel 7
Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	.152	.024
Kebijakan Pengungkapan	.066	.017
Transparansi Informasi	.006	.001

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian moderasi dilakukan dengan memasukkan variabel interaksi antara kebijakan pengungkapan dan independensi komite audit ($KP \times IKA$), serta transparansi informasi dan independensi komite audit ($TI \times IKA$) ke dalam model regresi. Hasil pengolahan data membentuk persamaan regresi moderasi sebagai berikut.

$$KLK = 0,295 + 0,077KP + 0,004 TI - 0,3961IKA + 0,385 (KP \times IKA) - 0,018(TI \times IKA) + e$$

Tabel 8
Hasil Moderated Regression Analysis

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.295	.016
	Kebijakan Pengungkapan	.077	.018
	Transparansi Informasi	.004	.001
	Independensi Komite Audit	-.396	.090
	X1Z	.385	.114
	X2Z	-.018	.006

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Hipotesis

Hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 13,999 dengan signifikansi 0,000, yang berarti model dinyatakan layak dan seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan (*Tabel 9. Hasil Uji F*). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,471 mengindikasikan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan 47,1% variasi kualitas laporan keberlanjutan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model (*Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi*). Ringkasan hasil pengujian seluruh hipotesis disajikan pada Tabel 12.

Tabel 9
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.229	5	.046	13.999	.000 ^b
	Residual	.222	69	.003		
	Total	.452	74			

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.507	.471	.05720

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Tabel 11
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.295	.016	18.236	.000
	Kebijakan Pengungkapan	.077	.018	4.308	.000
	Transparansi Informasi	.004	.001	3.208	.002
	X1Z	.385	.114	3.380	.001
	X2Z	-.018	.006	-2.951	.004

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Berdasarkan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan dalam penelitian, berikut ini disajikan pembahasan dari masing-masing hipotesis penelitian:

Tabel 12
Hasil Kesimpulan Hipotesis

Hipotesis	Prediksi	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
H1	Positif (+)	0,077	0,000	Diterima
H2	Positif (+)	0,004	0,002	Diterima
H3	Positif (+)	0,385	0,001	Diterima
H4	Positif (+)	-0,018	0,004	Ditolak

Pengaruh Kebijakan Pengungkapan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Kebijakan pengungkapan memiliki koefisien 0,077 dengan nilai t 4,308 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga **H1 diterima**. Sebanyak 81,33% perusahaan sampel telah memenuhi ketiga elemen kebijakan pengungkapan, yang mencerminkan bahwa mayoritas perusahaan perbankan telah memiliki pedoman yang jelas dalam menyampaikan informasi keberlanjutan. Hal ini mendukung penyusunan laporan yang lebih terstruktur dan konsisten sesuai standar GRI. Dalam perspektif teori agensi, kebijakan pengungkapan yang baik mendorong manajemen untuk menyampaikan informasi secara lebih transparan sehingga asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan María et al. (2019) dan Gerwing et al. (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola keberlanjutan yang kuat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan.

Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Transparansi informasi memiliki koefisien 0,004 dengan nilai t 3,208 dan signifikansi $0,002 < 0,05$, sehingga **H2 diterima**. Perusahaan dengan tingkat transparansi tinggi cenderung menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih lengkap dan kredibel karena telah terbiasa menyampaikan informasi kinerja dan aktivitasnya secara terbuka. Dalam kerangka teori agensi, transparansi yang tinggi mempersulit manajemen untuk menyembunyikan kinerja yang kurang baik, sehingga mendorong pelaporan yang lebih akuntabel. Hasil ini konsisten dengan Judijanto (2025), Michelin & Parbonetti (2015), dan Chang et al. (2019) yang menemukan hubungan positif antara transparansi informasi dan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Peran Moderasi Independensi Komite Audit pada Hubungan Kebijakan Pengungkapan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Variabel interaksi $KP \times IKA$ memiliki koefisien positif 0,385 dengan nilai t 3,380 dan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga **H3 diterima**. Keberadaan komite audit yang independen memperkuat pengaruh kebijakan pengungkapan terhadap kualitas laporan keberlanjutan, karena pengawasan yang objektif mendorong kebijakan pengungkapan diterapkan secara konsisten, bukan sekadar formalitas kepatuhan regulasi. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif dapat meredam konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, sebagaimana didukung oleh Buallay & Al-Ajmi (2020) dan Santonastaso et al. (2025).

Peran Moderasi Independensi Komite Audit pada Hubungan Transparansi Informasi dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Variabel interaksi $TI \times IKA$ memiliki koefisien negatif -0,018 dengan nilai t -2,951 dan signifikansi $0,004 < 0,05$. Meskipun signifikan, arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa independensi komite audit melemahkan pengaruh transparansi informasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan, sehingga **H4 ditolak**. Kondisi ini terjadi karena perusahaan yang sudah memiliki tingkat transparansi tinggi telah membangun sistem pelaporan yang baik secara mandiri, sehingga peran pengawasan komite audit menjadi kurang relevan. Dalam perspektif teori agensi, ketika asimetri informasi telah berkurang melalui transparansi yang efektif, fungsi moderasi komite audit tidak lagi menjadi faktor penentu utama. Temuan ini konsisten dengan Aprianti et al. (2022) dan Sriningsih & Wahyuningrum (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas independensi komite audit bersifat kondisional tergantung pada praktik pelaporan yang sudah berjalan di perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan dengan independensi komite audit sebagai variabel moderasi pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan pengungkapan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi elemen-elemen kebijakan pengungkapan secara komprehensif cenderung menghasilkan laporan keberlanjutan dengan kualitas yang lebih baik. Dengan adanya pedoman yang jelas membantu mengurangi asimetri informasi serta memastikan pelaporan keberlanjutan berjalan lebih konsisten, akurat, dan sesuai dengan ketentuan.

Kedua, transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Semakin tinggi tingkat transparansi informasi perusahaan dalam menyampaikan informasi, maka kualitas laporan keberlanjutan yang dihasilkan akan mengalami peningkatan secara baik. Transparansi informasi ini juga mendorong terciptanya akuntabilitas kepada publik yang memaksa manajemen untuk lebih jujur dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keberlanjutan.

Ketiga, independensi komite audit memperkuat pengaruh kebijakan pengungkapan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang independen memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki efektivitas penerapan kebijakan pengungkapan dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih objektif, informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan dapat lebih dipercaya.

Keempat, independensi komite audit tidak memperkuat pengaruh transparansi informasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Pada perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi, sistem pelaporan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik tanpa bergantung pada peran moderasi komite audit. Pengawasan komite audit yang independen cenderung membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, sehingga perannya dalam memperkuat hubungan tersebut menjadi terbatas.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang patut menjadi perhatian, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi sebagai variabel independen, sehingga belum mencakup faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.
2. Variabel moderasi yang digunakan masih terbatas pada independensi komite audit, padahal terdapat aspek tata kelola lain yang juga dapat memengaruhi hubungan antar variabel.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor perbankan dengan tingkat regulasi tinggi, sehingga hasilnya belum tentu dapat disamakan pada sektor lain dengan karakteristik yang berbeda.
4. Periode penelitian yang diamati masih terbatas, sehingga belum dapat menggambarkan perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Saran

Mengacu pada hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian, sejumlah saran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi untuk menghasilkan laporan yang lebih berkualitas dan informatif, yang juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan.
2. Perusahaan perlu memperhatikan peran dan independensi komite audit dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pengungkapan dan kualitas pelaporan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain, memperluas periode penelitian, serta menggunakan objek yang berbeda agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.



REFERENSI

- Aprianti, S., Susetyo, D., Meutia, I., & Fuadah, L. L. (2022). Audit Committee Characteristics and Sustainability Reporting in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 210(51), 42–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220304.006>
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2020). The Role Of Audit Committee Attributes In Corporate Sustainability Reporting Evidence From Banks In The Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2018-0085>
- Chang, W. F., Amran, A., & Iranmanesh, M. (2019). Drivers Of Sustainability Reporting Quality : Financial Institution Perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 35, 632–650. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2019-0006>
- Correa-garcia, J. A., Garcia-benau, M. A., & Garcia-meca, E. (2020). Corporate Governance And Its Implications For Sustainability Reporting Quality In Latin American Business Groups. *Journal of Cleaner Production*, 260, 121142. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121142>
- Dewi, I. P., & Pitriasari, P. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, XI(1), 33–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.13>
- Elkington, J. (2001). Enter The Triple Bottom Line. *The Triple Bottom Line: Does It All Add Up*, 1(1986), 1–16. <http://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>
- Gabriel-Odom, A. Q., Chukwu, U., & Monday Ikor, I. (2024). Impact of Corporate Governance on Sustainability Reporting: A Study of Deposit Money Banks in Nigeria (2012-2021). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 7(1), 26–38. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>
- Gerwing, T., Kajüter, P., & Wirth, M. (2022). The Role Of Sustainable Corporate Governance In Mandatory Sustainability Reporting Quality. *Journal of Business Economics*, 92(3), 517–555. <https://doi.org/10.1007/s11573-022-01092-x>
- Gómez-gonzález, E., Cano-montero, E. I., Santos-peñalver, J. F., & Chamizo-gonzález, J. (2025). Disclosure And Transparency Of Sustainability Information In Spanish Social Enterprises: An Empirical Study Of Audited Special Employment Centers. *Journal of Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32, 291–307. <https://doi.org/10.1002/csr.2947>
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate Social And Environmental Reporting A Review Of The Literature And A Longitudinal Study Of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09513579510146996>
- GRI. (2021). *Consolidated Set of the GRI Standards 2021*. <https://www.globalreporting.org/about-gri/>
- Guida, C. Di, Celentano, A., Mirone, F., & Amore, G. D. (2022). The Role Of Board Composition In CSR Disclosure : An Empirical Analysis In Four European Countries. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(3), 74–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.22495/cgobrv6i3p7>
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants Of Sustainability Reporting : A Review Of Results , Trends , Theory , And Opportunities In An Expanding Field Of Research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure* *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Judijanto, L. (2025). Transparency in Corporate Sustainability Accountability, and Social Impact. *Asian Business Research Journal*, 10(8), 95–102. <https://doi.org/10.55220/2576-6759.545>



- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). The Effect Of Corporate Governance On Carbon Emission Disclosures. 11(1), 35–53. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-07-2017-0144>. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 11(1), 35–53. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-07-2017-0144>
- Lusmeida, H., & Amelia, S. V. (2023). The Corporate Governance Moderates Determinants Affecting Sustainability Report Disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 27(03), 546–567. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/ja.v27i3.1713>
- María, I., Sánchez, G., Barbadillo, E. R., & Ferrero, J. M. (2019). Impact Of Disclosure And Assurance Quality Of Corporate Sustainability Reports On Access To Finance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management Journal*, 26, 832–848. <https://doi.org/10.1002/csr.1724>
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2015). The Effect Of Corporate Governance On Sustainability Disclosure. *Journal of Management and Governance*, 16(3), 477–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>
- OJK. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). In *Otoritas Jasa Keuangan*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx)
- Santonastaso, R., Macchioni, R., & Zagaria, C. (2025). Audit Committee Characteristics and Sustainability Performance : The Mediating Role of Sustainability Reporting Quality. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 1–17. <https://doi.org/10.1111/beer.12842>
- Sriningsih, S., & Wahyuningrum, I. F. S. (2022). Pengaruh Comprehensive Stakeholder Pressure Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 813–827. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.680>